

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SITI NURWASMA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi.
email: sitinurwasma@gmail.com

ABSTRACT

The development of human resources which are highly needed position and role to carry out and harmonize the tasks of the government and improve development in order to reach the community, and achieve national goals. The application of the principles of good governance in the population and civil registration department of Kuantan Sing District can be used and consideration material can be used as input. To realize and achieve these national goals, it requires employees who are disciplined, enthusiastic, and work responsibly and serve the community and the country. The purpose of this study was to study the Implementation of Good Governance in the Civil Service and Civil Pencil Office of Kuantan Singingi Regency. This research was conducted at the Population and Civil Registration Office of Kuantan Singingi Regency. The research method used is qualitative research, data collection techniques are interviews, observation and documentation. Based on the results of research published by the Department of Population and Civil Registration, Kuantan Singingi Regency can apply the principles of good governance well, then it can increase the number of members in providing services to the community, as well as adding processes so that services can run smoothly.

Keywords: The application of the principles of good governance, Disdukcapil

ABSTRAK

Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan kedudukan dan peranannya untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintah dan melanjutkan pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta mencapai tujuan nasional. Penerapan prinsip-prinsip good governance pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan agar dapat menjadi bahan masukan. Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional tersebut, maka dibutuhkan pegawai yang disiplin, bersemangat, dan bekerja penuh dengan tanggung jawab serta mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan good governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance tersebut dengan baik, kemudian dapat menambah jumlah anggota pegawai dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, serta menambah fasilitas agar proses pelayanan dapat berjalan lancar.

Kata Kunci: Penerapan prinsip-prinsip good governance, Disdukcapil

PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan kedudukan dan peranannya untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pemerintah dan melanjutkan pembangunan dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta mencapai tujuan nasional. Dalam pembukaan UUD 1945 telah tercantum tujuan nasional ialah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah dara Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional ini akan terlaksana dengan baik apabila dicapai dan dilaksanakan dengan terencana, dan sungguh-sungguh.

Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan nasional tersebut, maka dibutuhkan pegawai yang disiplin, bersemangat, dan bekerja penuh dengan tanggung jawab serta mengabdikan kepada masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan begitu pentingnya peranan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam pencapaian tujuan pembangunan, pegawai merupakan unsur penggerak utama yang terlibat dalam mekanisme pembangunan dan system pemerintahan. Untuk kepentingan tersebut, sangat dibutuhkan perhatian pemerintah terhadap kinerja pegawai.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin kerja pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, mengatur bahwa kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang harus dihindari oleh setiap pegawai negeri sipil. Adapun PP No.53.2010 itu menyatakan antara lain:

1. Mentaati ketentuan jam kerja.
2. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap bidang dan tugasnya masing-masing.
4. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai disiplin kerja pegawai.

Hal itu juga diperkuat dengan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, tentang pelayanan publik. Dinyatakan bahwa setiap pegawai harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Semua peraturan yang berkaitan dengan pelayanan tersebut adalah hanya bertujuan untuk menciptakan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka untuk penerapan *Good Governance*. Menurut Edelman dalam Wibowo (2004 : 5), Penerapan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *good governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik/tata pemerintahan yang lebih baik, disamping itu juga masih ada lapisan masyarakat menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, serta biayanya mahal.

Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “*good governance*” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. *Asian Development Bank* menegaskan adanya konsensus umum bahwa *good governance* di landasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency* (3) *rule of law* (4) *participation*. Jelas bahwa jumlah komponen atau pun prinsip yang melandasi tata pemerintah yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Menurut Lalolo Krina (2003) paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu (1) akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi masyarakat.

Diantara Instansi atau badan yang secara langsung melayani masyarakat dan menerapkan *good governance* adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Tingginya antusias masyarakat kabupaten kuantan singingi dalam pengurusan surat menyurat terutama dalam pengurusan kartu keluarga dan pembuatan kartu tanda penduduk menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan yang dijumpai dilapangan.

Tidak hanya antusias masyarakat, tapi juga terkadang mengapa prinsip-prinsip *good governance* belum bisa terlaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi adalah adanya ketidaksiapannya para pegawai atau birokrat dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah adanya pegawai yang terlambat masuk ke kantor dan mereka juga pulang lebih cepat dari pada waktu yang telah ditetapkan.

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu media yang berkaitan dengan pelayanan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi yang diberitakan oleh *Koridorzine.com* yang diterbitkan pada tanggal 31 juli 2018. Dengan tema Pegawai Dukcapil Kuansing Terlambat Masuk Kantor, Warga Mengeluh. Yang mana media tersebut memberitakan bahwa pegawai masuk kantor lambat tapi pulang cepat. Pantauan *Koridorzine.com*, Selasa (31/7), sekitar jam 08:00 WIB, Disdukcapil belum melakukan pelayanan, sementara masyarakat sudah antri menunggu. Jasri, warga Kuansing mengeluh dengan pelayanan Disdukcapil. Ia mengaku datang pagi dengan harapan terlebih dahulu mendapat pelayanan, ternyata di kantor belum ada pegawai.

Dari latar belakang masalah di atas yang ditemui di lapangan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Administrasi Negara

Menurut Siagian (2008:2) dalam buku Filsafat Administrasi mengatakan: “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Max Weber dalam Kumorotomo dengan bukunya “Etika Administrasi Negara” (2005:82) Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara.

Teori Organisasi

Organisasi merupakan manifestasi solidaritas mekanik, yaitu bahwa organisasi didasarkan atas persamaan, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan institusi, kemampuan partisipasi aktif sehingga memungkinkan dan terbuka jalan ke arah perluasan keahlian serta keterampilan. Setiap karyawan mampu menguasai bidang-bidang tugas atau pekerjaan lain yang bertujuan membantu karyawan bila terjadi pemutusan hubungan kerja atau tiba masa pensiun atau pengurangan tenaga kerja atau dorongan untuk diversifikasi usaha-usaha lain melalui pendidikan dan pelatihan. Hasan Monoarfa, op.cit, hlm.67

Teori Manajemen

Secara etimologi, kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sebagai contoh, karya-karya seni peradaban manusia seperti menara Eifel, tembok besar Cina, candi Borobudur dan lain sebagainya merupakan hasil dari suatu proses manajemen yang sukses.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, Pegawai Negeri Sipil ialah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu jenis Kepegawaian Negeri di samping anggota TNI dan

Anggota POLRI (UU No 43 Th 1999). Pengertian Pegawai Negeri adalah warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999).

Pegawai negeri sipil dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat (PNS Pusat), yaitu PNS yang gajinya dibebankan pada APBN, dan bekerja pada departemen, lembaga non departemen, kesekretariatan negara, lembaga-lembaga tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, serta kepaniteraan di pengadilan.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNS Daerah), yaitu PNS yang bekerja di Pemerintah Daerah dan gajinya dibebankan pada APBD. PNS Daerah terdiri atas PNS Daerah Provinsi dan PNS Daerah Kabupaten/Kota.

Teori *Good Governance*

Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporasi dan lembaga pendidikan tinggi. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara di Indonesia, terminologi *good governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Nuryanto.A.Daim 2014:43).

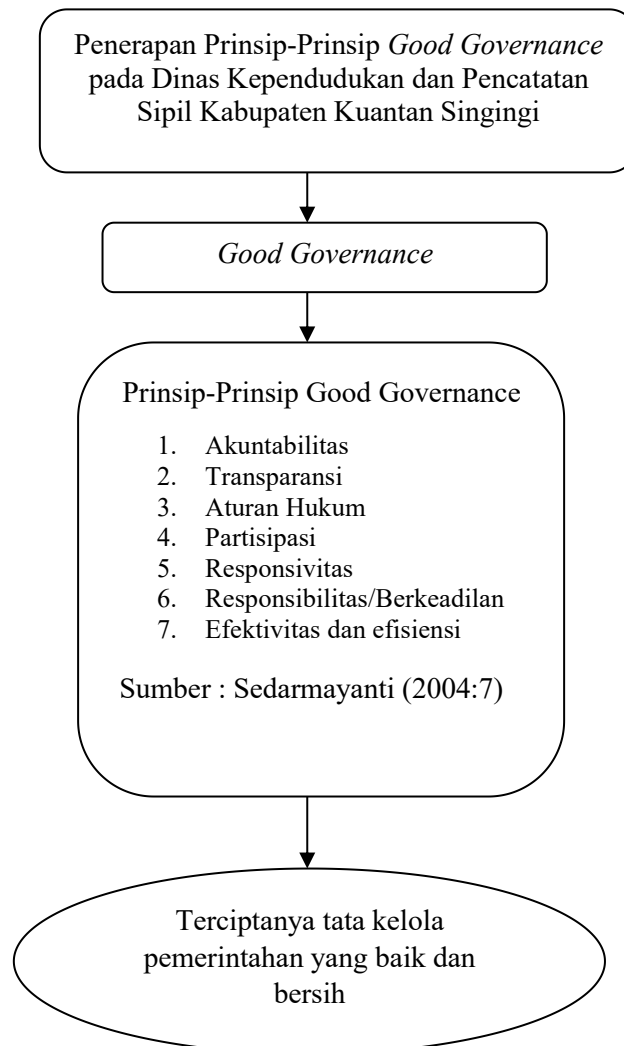
Prinsip-Prinsip *Good Governance*

United Nation Development Program (UNDP) mengemukakan (Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi 2012: 39-40) ada Sembilan Prinsip *Good Governance* yaitu:

1. Partisipasi menuntut setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara.
2. Penegakan Hukum. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan dengan adil dan tanpa pandang bulu.
3. Transparansi, adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.
4. Daya tanggap, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
6. Berkeadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
9. Bervisi strategis, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. “Diduga Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* Pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Belum Dilaksanakan Dengan Baik.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui dan memahami tentang Penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang akan dimintai keterangannya atau orang yang memberikan informasi terkait permasalahan yang akan diteliti Andi (2010:132) dalam buku teknik-teknik koleksi data penelitian kualitatif menjelaskan bahwa, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Teknik penarikan sampel untuk masyarakat penulis menggunakan teknik Simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang paling sederhana (*simple*). Sampel diambil secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan kelas, usia dan jenis kelamin.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer yaitu Data Primer adalah data pokok atau data yang diperoleh langsung dari responden, data yang dibutuhkan adalah data tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder yaitu Data Sekunder adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung dalam penelitian ini, data ini didapat atau diketahui dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Fokus Penelitian

Fokus diperlukan untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian, sebab dengan menentukan fokus penelitian secara tepat sesuai dengan tujuan masalah penelitian, sehingga penelitian bisa dilakukan secara terarah dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Penerapan Prinsip-Prinsip *good governance* Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Peneliti menentukan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi. Mengingat karena Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pusat semua pencatatan dan begitu banyak data-data kependudukan yang akan dibuat.

Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) dalam Buku Sugiono mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Penulis melakukan pengamatan Langsung kelapangan untuk melihat secara langsung keadaan yang sebenarnya yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Sutrisno Hadi (1986) dalam buku Sugiono mengemukakan bahwa, anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka langsung dengan orangnya maupun dengan menggunakan telepon. Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada pegawai yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti demi kesempurnaan data yang akan diperoleh.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan.” Menurut Suharsimi Arikanto (2011:201) adalah sebagai berikut :“Dokumentasi adalah barang-barang tertulis.” Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data yang diidentifikasi dari dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat.

Penyajian Data (Display)

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.

Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan *display* data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Akuntabilitas

Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, masih banyaknya masyarakat yang menunggu lama dala pengurusan dalam pelayanan, dan waktu istirahat juga agak terlalu lama dan membuat para pegawai agak lambat masuk kantor walaupun kantor tersebut memang dibuka pada setiap hari kerja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk indikator pertama dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan.

Indikator Transparansi

Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang sudah banyak informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah yang ditampilkan pada mading dang juga dapat diakses melalui web resminya.

Dengan demikian berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan beberapa waktu yang lalu ketika melakukan wawancara dengan beberapa informan yang ada dilpangan dapat dikatakan bahwa untuk indikator transparan dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan sudah cukup terlaksana dengan baik. Yang mana hal ini masih dapat dilihat masih banyaknya masyarakat yang mengurus surat menyurat melalui agen atau calo yang dimanfaatkan. Selain itu juga dapat dilihat

terkadang adanya pembiayaan yang dikeluarkan dan tidak begitu jelas sumber serta besaran yang harus dikeluarkan.

Indikator Supremasi Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dan masyarakat tersebut terkait pelaksanaan aturan-aturan dalam menciptakan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana aturan tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang masih banyak kendala dalam pelaksanaan aturan-aturan tersebut, diantaranya masih kurang sumberdaya dan alat pendukung serta kurangnya pengawasan yang dilakukan serta sanksinya juga belum terlaksana secara merata. Disaat peneliti melakukan obsevasi kelapangan secara langsung, dapat juga dilihat yang mana masih kurangnya sosialisasi aturan-aturan terkait pelayanan dan juga aturan-aturan yang berkaitan dengan pembayaran pada kantor tersebut. Sebaiknya di tampilkan pada dinding atau semacam baliho pada kantor tersebut, sehingga dengan demikian seluruh masyarakat dapat melihat secara langsung, kalau hanya melalui web hanya sebagian saja yang dapat melihatnya.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk penegakan supermasi hukum dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan dapat dikatakan masih kurang terlaksana dengan baik.

Indikator Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dan masyarakat tersebut terkait keterlibatan capil dalam menciptakan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana keterlibatan masyarakat tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang masih banyak kendala dalam pelaksanaan partisipasi tersebut, diantaranya masih kurang sumberdaya dan alat pendukung serta kurangnya pengawasan yang dilakukan serta sanksinya juga belum terlaksana secara merata. Selain itu, berdsarakan pengamatan peneliti dilapangan, banyak sebenarnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar sebuah pemerintah yang bersih dapat dicapai dengan maksimal dan dapat terwujud. Salah satu contohnya yang menjadi kebutuhan masyarakat akan hal tersebut adalah gedung yang refresetatif serta ruang tunggu yang memadai, sehingga msayarakat merasa nyaman ketika berada dalam kantor tersebut, tetapi nyatanya pada saat sekarang, dapat kita lihat secara bersama-sama yang mana gedungnya masih kurang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada selurh masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga dengan demikian akan kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dan juga akan sulit menciptakan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk partisipasi dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan dapat dikatakan masih kurang terlaksana dengan baik.

Indikator Daya Tanggap

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dan masyarakat tersebut terkait tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana tindakan-tindakan tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang masih banyak kendala dalam pelaksanaan daya tanggap tersebut, diantaranya masih kurang sumberdaya dan kurangnya tanggapan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan serta sanksinya juga belum terlaksana secara merata. Selain itu pula, berdasarkan hasil obeservasi peneliti dilpangan ketika peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang mana memang masih ada pegawai yang masih kurang tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama ketika ada komplain atau eluhan dari masyarakat, yang mana sebagian pegawai hanya bersifat acuh saja dan ada juga yang mengabaikannya saja. Kalaupun ditanggapi, hal itu hanya sekedar tanggapan semata, tapi tidak ada tindak lanjut kedepannya, sehingga dengan demikian untuk kedepannya tidak akan da perubahan sebagai mana mestinya. Dengan demikian pula, tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan kurang maksimal, serta juga akan menyulitkan dalam menciptakan pemerintah yang baik dan bersih.

Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk indikator daya tanggap dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan dapat dikatakan masih kurang terlaksana dengan baik.

Indikator Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dan masyarakat tersebut terkait persamaan dan keadilan yang dibuat oleh pemerintah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana kedilan tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang masih banyak kendala dalam pelaksanaan keadilan tersebut, diantaranya masih kurang sumberdaya dan kurangnya tanggapan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan serta sanksinya juga belum terlaksana secara merata. Dilihat dari indikator keadilan tersebut, dapat dilihat dari hasil observasi peneliti dilapangan ketika melakukan wawancara dengan beberapa informan, yang mana keadilan dimaksud disini adalh keadilan para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata.

Namun hal ini yang terjadi dilapangan, para pegawai belum melayani masyarakat secara adil dan merata. Masih terdapatnya tebang pilih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga masih terdapatnya masyarakat yang melakukan sebuah urusan administrasi denga sistem kekeluargaan. Sehingga hal ini akan berdampak kepada pelayanan kepada

masyarakat, dan juga akan berdampak kepada pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dan juga akan menyulitkan dalam pelaksanaan pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih terutama di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk indikator keadilan dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan dapat dikatakan masih kurang terlaksana dengan baik.

Indikator Efisien dan Efektif

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pemerintah dan masyarakat tersebut terkait penggunaan anggaran yang dibuat oleh pemerintah dalam menciptakan pemerintah yang bersih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana penggunaan anggaran tersebut masih belum dilaksanakan secara maksimal. Menurut observasi dan pengamatan peneliti dilapangan, memang masih banyak kendala dalam penggunaan anggaran tersebut, diantaranya masih kurang sumberdaya dan kurangnya tanggapan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan serta sanksinya juga belum terlaksana secara merata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk indikator efektif dan efisien dari penerapan prinsip *Good Governance* masih kurang baik berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti dilapangan dapat dikatakan masih kurang terlaksana dengan baik.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan informan, hasil observasi dan analisa peneliti serta ditambah dengan dokumentasi peneliti maka didapatkan hasilnya bahwa penerapan prinsip-prinsip *good Governance* pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi masih dalam kategori kurang baik.

Dalam hal ini dapat peneliti berikan analisa kembali, yang mana dari tujuh indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, hanya sebagian kecil saja baru yang sudah terlaksana, dan masih banyak lagi indikator yang belum terlaksana dengan baik. Jika dilihat dari beberapa indikator penelitian, hampir semua indikator tersebut masih kurang baik. Yang mana kalau dilihat hasil wawancara dengan informan orang kantor sebagai pemberi layanan kepada masyarakat mereka semua sudah mengatakan baik dan sudah melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sementara kalau kita lihat dari hasil wawancara dengan informan masyarakat, kebanyakan dari masyarakat masih mengatakan kurang baik para pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk menciptakan prinsip-prinsip *good governance*. Sehingga dengan demikian, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dan ditambah dengan keterangan-keterangan dari informan, serta bukti-bukti dilapangan dapat dikatakan bahwa memang masih banyak kendala-kendala bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan pemerintah yang bersih. Yang mana masih banyaknya fasilitas yang belum memadai, ruang tunggu yang juga masih sangat sedikit, serta alat-alat pendukung lainnya yang masih kurang serta jaringan internet yang sering terputus, sehingga menghambat dalam pemberian pelayanan

kepada masyarakat, dan kalau sudah terhambat pemberian pelayanan kepada masyarakat tentu akan menghambat juga pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*, dan juga akan berdampak kepada terhambatnya pelaksanaan pemerintah yang baik dan bersih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan beberapa waktu yang lalu yang diperoleh dengan hasil wawancara dan hasil analisa peneliti serta dokumentasi peneliti dapat diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kuantan singingi belum berjalan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah *subhanahu wata'ala* yang maha pengasih lagi maha penyayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi”**. Ucapan shalawat dan salam, *Allahummasali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad*, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang terang benderang untuk mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Ibu Ir.Hj Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Desriadi S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dorongan dan semangat serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sahri Muharam, S.Sos. M.S.i selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Bapak/Ibu Dosen, Karyawan Tata Usaha fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materi.
6. Terima kasih juga disampaikan Kepada Orang Tua, saudara, dan sahabat penulis.
7. Serta terima kasih juga untuk rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin namun jika ada sumbangan pemikiran, kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun untuk lebih sempurnanya penulisan dan pelaksanaan penelitian ini nantinya, akan penulis pertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Achmadi, Abu dan Cholid Nurboko. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dantes, Nyoman. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi*. PT Prestasi Jakarta: Pustakaraya.
- H. Inu Kencana Syafie, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kencana Syafi'I, Inu, 2003. *Sistem Administrasi Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khaerul Umam. 2010. *Perilaku Organisasi*. CV. Pustaka Setia
- Melayu, S.P. Hasibuan. 2005. *Organisasi dan Motivasi, dasar peningkatan produktivitas* : Bumi Pusaka.
- Manulang, 2004. *Dasara Dasar Manajemen*. Yogyakarta:Gajah Mada University.
- Max Webber dalam Kumorotomo dengan bukunya (2005:82). *Etika Administrasi Negara*: Raja Grafindo.
- Retno Sunu Astuti, 2014. *Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam meningkatkan daya saing bangsa*. Semarang. UNDIP.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Kepemimpinan dan Prilaku*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Formulasi Kebijakan*. Jakarta: Buni Aksara.